



## Menari dengan Kata-Kata: Kritik Mahbub Djunaidi terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia 1970 – 1990

### *Dancing with Words: Mahbub Djunaidi's Criticism of Indonesian Government Policy 1970 – 1990*

Johan Wahyudhi<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup>✉ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: [johan.wahyudi@uinjkt.ac.id](mailto:johan.wahyudi@uinjkt.ac.id)✉

Diterima: 18 Februari 2024

| Direvisi: 12 Maret 2024

| Diterbitkan: 25 Maret 2024

#### ARTICLE INFO

#### ABSTRACT

##### Keywords:

Criticism,  
New Order,  
Literature and Satire.

*This paper describes Mahbub Djunaidi, a social activist, journalist and writer who often protested against government policies from 1970 to 1990. During this period, Indonesian Muslims lived in a different social and political atmosphere than before. Previously, Muslims in Indonesia were relatively free to express their thoughts and political activities, but during this 20-year period, the situation became more restrictive. President Soeharto's government allegedly carried out a series of restrictive actions to inhibit political freedom and intellectual development for some Muslims, especially those belonging to Nahdhlatul Ulama, the largest Islamic mass organisation in Indonesia at that time. This paper will use an intellectual history approach by putting forward a number of Mahbub's writings relating to his criticism of the Soeharto government. Mahbub's writing style is known for combining humour and satire, making him one of the most prominent columnists in Indonesia at the time.*

##### Kata Kunci:

Kritik,  
Orde Baru,  
Sastra dan Satir.

Tulisan ini menjelaskan tentang Mahbub Djunaidi, salah seorang aktivis sosial, wartawan dan sastrawan yang kerap melakukan protes kepada kebijakan pemerintah pada kurun 1970 hingga 1990. Di masa tersebut, umat Islam Indonesia hidup dalam suasana sosial dan politik yang berbeda dari masa sebelumnya. Sebelumnya, muslim di Indonesia relatif lebih bebas dalam mengekspresikan pemikiran dan aktivitas politiknya, maka di periode 20 tahun tersebut, keadaanya berubah menjadi lebih terikat. Pemerintahan Presiden Soeharto diduga melakukan serangkaian aksi pembatas untuk menghambat kebebasan berpolitik dan pengembangan intelektual bagi sebagian umat Islam, utamanya yang tergabung dalam Nahdhlatul Ulama, suatu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia kala itu. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan sejarah intelektual dengan mengedepankan sejumlah tulisan Mahbub yang berkenaan dengan kritiknya pada Pemerintahan Soeharto. Gaya penulisan Mahbub dikenal memadukan humor dan satir, sehingga menempatkannya sebagai salah satu kolumnis ternama di Indonesia kala itu.

#### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai dinamika politik yang problematik, khususnya pada periode 1960 hingga 1970. Di masa itu terjadi transisi

kekuasaan dari Soekarno, Presiden Indonesia pertama, ke tangan Soeharto, sebagai presiden kedua. Iklim politik di masa itu cenderung memanas, oleh sebab Soeharto diduga melakukan operasi rahasia dengan

menggerakkan koneksi militernya untuk mendukung pencalonannya sebagai Presiden Indonesia.

Penurunan Presiden Soekarno pada 1966, oleh sebagian kalangan, dianggap sebagai aksi yang tidak sepatutnya. Soekarno dianggap masih dibutuhkan untuk memimpin negara Indonesia yang posisinya ibarat bayi yang baru lahir. Di sisi lain, suara oposisi menyatakan Soekarno harus turun dikarenakan ia telah memperkuat persepsinya menjadi diktator, yang tidak memberikan kebebasan dan memelihara iklim demorasi di Indonesia. Disahkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, menjadi pertanda akan adanya niat Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup.

Setelah berhasil keluar dari polemik masa transisi, pada tahun 1968, Soeharto pun secara resmi memimpin Indonesia. Ia segera membawa negara baru ini pada peta panjang pembangunan multisektor yang bertujuan untuk mendorong Indonesia menjadi negara modern yang mengdepankan industri sebagai ekonominya. Secara bertahap, pembenahan di sektor agraris dilakukan yang nantinya juga akan menunjang sektor industrial. Hal itu mampu dilakukannya setelah terlebih dahulu, memenangkan perlombaan politik dengan cara menekan lawan politiknya (Jenkins, 2021).

Soeharto mempunyai kekuatan yang besar dalam mengatur militer. Di eranya, tentara mempunyai peran ganda sebagai birokrat yang memastikan program-program negara dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut bukan hanya berlaku di Jakarta sebagai ibukota, melainkan juga di daerah-daerah atau provinsi lainnya. Ia ingin agar pemerintahan Indonesia bersifat

sentralistik, dengan Jakarta sebagai pusat pembentukan iklim politik, ekonomi bahkan hingga budaya. Karena gaya kepemimpinan Soeharto yang berbeda dengan Soekarno yang dianggap masih belum dapat merealisasikan gagasannya, maka era Soeharto kerap disebut Era Pembangunan yang akrab juga disebut dengan Orde Baru, yang muncul dari Orde Lama yang ditujukan pada masa pemerintahan Soekarno.

Uniknya, Pemerintahan Soeharto menolak jika gaya pemerintahannya dianggap diktator. Lewat keberadaan pemilihan umum untuk menentukan anggota dewan di parlemen serta memilih presiden, yang umumnya dimenangkan oleh kader-kader dari Partai Golongan Karya atau Golkar, partai yang mengusung pemerintahan Soeharto, Orde Baru berkomitmen mengusung model negara demokrasi modern, dengan meletakkan kadaulatan politik di tangan rakyat. Ulf Shundausen melihat model ini sebagai bentuk keberaturan yang memang dicanangkan di atas perangkat demokrasi, namun dalam praktiknya, banyak koneksi militer Soeharto yang mendesain pemaksaan dan pembatasan bagi suara politik yang kontra Golkar untuk dapat mewujudkan aspirasi politiknya (Sundhaussen dan Green, 2021). Hasilnya, model negara demokrasi yang dibentuk Orde Baru dianggap tidak lebih dari negara demokrasi palsu (Lindsey, 2018).

Pemerintah Soeharto cenderung mewaspadaikan potensi politik umat Islam sebagai penantang rezim militer-nasionalisnya. Pada 5 Januari 1973, empat partai Islam yakni Partai Nahdhlatul Ulama (NU), PSII, Masyumi dan

Perti melebur (fusi) dan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Usaha ini terjadi berkat pemerintahan Soeharto yang ikut campur dalam pengelolaan internal partai, sehingga seolah-olah gerakan fusi partai Islam muncul dari semangat kader-kader partai itu sendiri. Soeharto menggunakan strategi dengan mendistribusikan orang kepercayaannya atau dengan negosiasi, untuk kemudian mengontrol partai-partai itu hingga pembentukan partai tunggal bagi umat Islam (Kadir, 1999).

Penyatuan partai di atas tentu saja menjadi salah satu puncak gunung es dari kekhawatiran Soeharto akan bangkitnya gerakan politik yang berbasiskan fanatisme keagamaan. Atas dalih pengamalan Pancasila, dasar negara Indonesia, Pemerintah Indonesia senantiasa mengokohkan kedudukannya di atas para tokoh agama yang dianggap berpengaruh. Partai NU misalnya adalah salah satu partai yang mengakui Pancasila sebagai dasar ideologinya. Ini dilakukan sebagai cara untuk bertahan hidup dari ancaman strategi politik penguasa (Morfit, 1991).

Media massa menjadi salah satu saluran yang kerap melayangkan kritik ke penguasa. Para intelektual, tokoh politik, atau public figure lainnya kerap menggunakan media massa sebagai sarana pengingat bagi penguasa. Jika diperhatikan, setiap tulisan akan bergantung dengan cara penulisnya dalam menulis. Sebagian besar model tulisan di media massa menggunakan gaya bahasa populer yang dekat dengan pemahaman masyarakat kelas bawah. Sebagian yang lain tetap setia dengan model bahasa Indonesia resmi yang terkesan lebih modern dan intelektual. Di antara beragam

tulisan tersebut, gaya tulisan Mahbub Djunaidi menempati posisi yang berbeda.

Mahbub Djunaidi kerap mendesain tulisannya dengan gaya humor dan satir. Ini dapat ditemukan dalam rubrik "Asal-Usul" yang dimuat oleh koran Kompas. Ia kerap mendesain kritiknya pada aneka kebijakan pemerintah dengan gaya bahasa yang santai, terkesan tidak langsung dan bernuansa sastra. Hal ini dilakukannya agar masyarakat kelas bawah tetap bisa menikmati tulisannya, tanpa harus kesulitan memahaminya.

Terdapat sejumlah sarjana yang meneliti tentang bagaimana peran humor dan satir sebagai sarana kritik kepada penguasa. Liliya Duskaeva melihat bahwa humor terlibat dalam menciptakan komunikasi media yang efektif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa olok-olok (menghina) adalah sarana untuk merespon suatu peristiwa dari jauh, untuk mengurangi kesedihan yang tidak perlu dalam pidato pejabat tinggi negara, dan secara tidak langsung menekankan kontradiksi publik. Penanda bahasa olok-olok paling sering ditemukan dalam metateks. Dalam bentuk-bentuk ironi seperti itu, referensi dan petunjuk terselubung diekspresikan, yang membutuhkan upaya kognitif tambahan untuk memahaminya.

Perasaan yang memotivasi ironi tersembunyi di balik topeng, merupakan kebalikan dari perasaan yang tersirat yang diungkapkan dalam teks. Ini bisa dilihat dari kemarahan tersembunyi di balik keterkejutan dan kebingungan. Olok-olok adalah ciri khas media massa bisnis, di mana setiap peristiwa ditransmisikan dari jarak jauh. Ejekan adalah ciri khas media massa sosial politik. Hal ini diekspresikan dalam muatan konflik dari teks media-keinginan untuk

mendiskreditkan objek pembicaraan-dan sering kali bertindak sebagai sarana untuk mentransmisikan keterasingan, yang menunjukkan oposisi kategoris dari posisi seseorang terhadap posisi orang lain.

Duskaeva memosisikan tulisannya dalam konteks studi komunikasi, bukan studi sejarah. Penulis justru akan mengupas sejumlah tulisan Mahbub Djunaidi dan memberikan analisa konteks atas lahirnya tulisan tersebut. Ini merupakan bagian dari model penelitian sejarah intelektual, Di mana subjek yang diteliti, mempunyai keterkaitan dengan suatu masa yang berlalu, dan ini dapat dideteksi dan menjadi objek penelitian sejarah, dengan melihat pada tulisan yang ditinggalkannya (Duskaeva, 2021).

Berbeda dengan Duskaeva, Imron Rosidi menjadikan sejarah Indonesia sebagai konteks atas tulisannya ketika melihat aspek hubungan Orde Baru dan masyarakat Islam, terutama dalam bidang relasi politik. Evolusi politik Islam di Indonesia telah ditandai oleh konflik sengit antara para intelektual Muslim dan para intelektual yang menganut keyakinan sekuler. Sejak masa kemerdekaan Indonesia hingga Orde Lama, para intelektual Muslim mendedikasikan upaya mereka untuk memerangi Islam politik dengan membentuk partai-partai politik dan mengadvokasi Islam sebagai dasar negara.

Rosidi menggunakan pendekatan historis dan pendekatan kualitatif dalam membicarakan tema tentang aktivitas politik Islam di era Orde Baru. Kepemimpinan Soeharto memiliki perspektif yang pesimis terhadap Islam politik. Perspektif ini berasal dari sikapnya yang

menentang kelompok-kelompok politik Islam. Tujuan utama Orde Baru berpusat pada prioritas stabilitas nasional dan mendorong kemakmuran ekonomi. Kemajuan ekonomi pemerintahan Orde Baru mengakibatkan munculnya generasi baru intelektual Muslim. Sebagian kelompok pemikir Muslim saat itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Mereka lebih memprioritaskan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam organisasi-organisasi apolitis daripada berpartisipasi dalam partai politik secara langsung (Rosidi, 2022).

Ulfiyana Latifah dan Agus Mulyana tertarik untuk membincangkan peta pemikiran Mahbub Djunaidi. Sebagai seorang kolumnis, Mahbub memainkan peran yang signifikan dalam memperkenalkan pemikirannya melalui publikasi di berbagai surat kabar. Dalam hal agama, pemikiran Mahbub Djunaidi tidak hanya mempertimbangkan aspek spiritual, tetapi juga menyoroti kehidupan sosial yang tidak terlepas dari konsep Ahlussunnah Wal Jama'ah. Ia membahas isu-isu seperti moralitas, etika, dan nilai-nilai yang penting dalam masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang dipegang teguh.

Di sisi politik, pemikiran Mahbub Djunaidi merambah hubungan antara Islam dan negara, serta keterkaitan antara Nahdlatul Ulama dengan negara, dengan fokus pada pandangan demokrasi. Ia membahas bagaimana agama dapat diintegrasikan dalam struktur politik, merangkul ide-ide demokrasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, serta menjelaskan hubungan antara organisasi keagamaan dan negara. Melalui metode sejarah yang digunakan Latifah dan Mulyana dalam penelitian ini,

terungkap bahwa pemikiran Mahbub Djunaidi memberikan sumbangan penting terhadap perspektif keagamaan dan politik, yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut guna mengungkapkan fakta-fakta baru yang belum terungkap dalam penelitian ini.

Kendati mempunyai sejumlah persamaan dengan kertas kerja Latifah dan Mulyana, tulisan ini tidak hanya membicarakan sesuatu yang filosofis, seperti hubungan agama dan negara. Analisa yang dikembangkan lebih ke arah bagaimana tulisan Mahbub membicarakan tentang kritiknya kepada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintahan Soeharto. Jadi, ini akan menyorot pada sesuatu yang lebih kontekstual daripada pekerjaan Latifah dan Mulyana.

Pendekatan sejarah intelektual yang disinggung dalam tulisan ini digunakan sebagai suatu cara pandang dalam melihat korelasi gagasan Mahbub Djunaidi dengan pengalaman intelektual yang digelutinya. Suatu pemikiran tidak lahir dari ruang kosong, melainkan muncul dari kontemplasi seorang penulis atas problem-problem sosial yang mengitari kehidupannya. Mahbub menjadikan tulisannya sebagai peluru untuk menyerang suatu gagasan pemerintah yang dianggapnya kontraproduktif terhadap kepentingan keadilan dan perlindungan terhadap golongan yang terpinggirkan.

## **METODE**

Penelitian sejarah tentang kritik Mahbub Djunaidi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia pada rentang waktu 1970 hingga 1990 memerlukan pendekatan metodologi yang teliti untuk mengungkap perspektifnya yang mendalam terhadap dinamika politik dan sosial

pada periode tersebut. Langkah-langkah metodologis dalam penelitian ini melibatkan serangkaian tahap yang memungkinkan analisis yang komprehensif.

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah tahap heuristik, di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan tentang Mahbub Djunaidi serta kebijakan pemerintah Indonesia pada masa tersebut. Ini melibatkan pencarian di pusat-pusat penyimpanan arsip, guna menemukan dokumen-dokumen lama, arsip surat kabar, tulisan-tulisan Mahbub Djunaidi dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan konteks yang diperlukan.

Langkah kedua adalah kritik sumber, di mana peneliti mengevaluasi keandalan, validitas, dan relevansi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan analisis yang hendak dilakukan.

Tahap interpretasi menjadi langkah selanjutnya, di mana peneliti menganalisis secara mendalam pandangan-pandangan yang terdapat dalam karya-karya Mahbub Djunaidi terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Interpretasi ini memerlukan pemahaman yang cermat terhadap konteks sosial, politik, dan historis pada periode waktu yang diteliti.

Terakhir, tahap historiografi menjadi kunci untuk menyusun ulang temuan-temuan dalam kerangka historis yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya sekadar mengungkap pandangan Mahbub Djunaidi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga memahami bagaimana pandangan tersebut dapat ditempatkan dalam konteks sejarah yang lebih besar, serta

bagaimana kontribusi pandangannya memengaruhi pemikiran politik dan sosial pada masa itu. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kritik Mahbub Djunaidi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia pada rentang waktu yang diteliti (Madjid dan Wahyudi, 2014).

Analisa yang dikembangkan dari tulisan Mahbub Djunaidi bertumpu pada konsep sejarah intelektual. Pemikiran yang ditulis berangkat dari kesadaran dan pemahaman di penulis akan sesuatu. Dalam konstruk sejarah intelektual, seseorang yang memiliki kepekaan atau kecenderungan pada paradigma tertentu mempunyai ikatan dengan masa lalunya, baik dari segi pergaulan, lingkungan, bacaan, inspirasi atas public figure tertentu dan lain sebagainya. Dengan melihat pada riwayat hidupnya, maka akan terlihat model intelektual yang melingkupi pemikirannya (LaCapra, 1980).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahbub Djunaidi dikenal sebagai seorang jurnalis-sastrawan, agamawan, organisatoris, kolumnis, politikus, dan sempat menjabat di berbagai berbagai posisi terhormat lainnya. Ia sempat tercatat sebagai ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang pertama. Ia lahir di Jakarta, tepatnya pada 22 Juli 1933. Kepribadiannya cenderung aktif, periang, jenaka namun serius saat menekuni suatu pekerjaan. Tingkat kritik sosial dalam tulisan-tulisannya sangat tajam dan mendalam. Tentu saja, dalam tulisannya, ia memiliki kualitasnya sendiri yang berbeda: satir dan komedi. Karena kemampuan menulisnya yang

luar biasa, ia mendapat gelar "pendekar pena". Oleh sebab kepiawaiannya dalam menulis, Bung Karno, Presiden Pertama Republik Indonesia, menjalin persahabatan dengannya.

Mahbub telah terlibat dalam dunia tulis-menulis sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pada masa itu, cerpennya yang berjudul Tanah Mati dimuat di Kisah, sebuah jurnal bergengsi yang terkenal dengan kumpulan cerita pendek yang berkualitas tinggi. Publikasi tersebut menyertakan komentar dan evaluasi dari pengelolanya, HB Jassin, seorang tokoh terkenal dalam sastra Indonesia. Jassin sangat terinspirasi oleh tulisan Mahbub muda. Mahbub memiliki kemampuan untuk mendekati kesulitan dengan sudut pandang yang lucu, yang menarik baginya. Penggunaan komedi dan satir, yang ditandai dengan nada mengejek yang bertujuan untuk menghebohkan, disertai dengan aspek-aspek kritik, menjadi ciri khasnya. Tulisannya menunjukkan bakat yang ringan dan aneh, meskipun menyelidiki masalah-masalah yang signifikan.

Keberanian Mahbub dalam menyuarakan kebenaran dan mengadvokasi mereka yang terpinggirkan tidak diragukan lagi. Ia dijuluki "burung parkit di kandang harimau" karena keberanian tulisannya mengkritik pemerintah. Dia banyak menulis, mendedikasikan perhatiannya dan memberikan advokasi bagi mereka yang miskin. Ini termasuk anak-anak pedagang kaki lima dan orang-orang muda yang mengemis di persimpangan jalan. Dia memiliki reputasi sebagai periang dan nakal. Baginya, semua orang dianggap memiliki martabat yang sama, terlepas dari pangkat atau pekerjaan mereka. Jaringan sosialnya sangat luas, dan

orang-orang biasa dipanggil dengan sebutan "Anda," "saudara," atau "kawan."

Dalam bidang sastra, Mahbub memiliki ketertarikan yang kuat pada sastra Rusia karena ia menyadari bahwa para penulis Rusia telah membuat banyak karya sastra yang penuh dengan kritik tajam dan diceritakan dengan cara yang jenaka. Kehadiran kecerdasan yang halus membuat komentar-komentarnya menjadi lucu. Perspektif dan kecenderungannya memotivasi dia untuk menciptakan sastra yang lucu. Tidak mengherankan jika sebagian besar kolom Mahbub berkisar pada masalah politik dan sosial, namun disajikan dengan cara yang sastrawi.

Kata-kata Mahbub yang penuh dengan komedi, memiliki kemampuan untuk mencegah siapa pun yang menjadi target kritiknya merasa tersinggung. Sebaliknya, ada banyak orang yang menyatakan empati dan memuji keahliannya dalam menyusun kritik yang koheren dan menarik. Tidak diragukan lagi, penyertaan komedi dalam tulisannya mengundang tawa dari para pembaca, bahkan dalam situasi yang genting sekalipun. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan dampak emosional. Tulisan Mahbub memiliki ciri khas berupa perpaduan antara hiburan dan tantangan, membangkitkan tawa dan kesedihan.

Mahbub dengan terampil menghasilkan rasa hiburan yang paradoks. Hal ini tidak terlepas dari pengalamannya di industri media. Dia telah mempelopori berbagai inisiatif media massa dan menulis serta menerjemahkan banyak buku. Dia terkenal karena dedikasinya yang gigih untuk menjaga otonomi jurnalisme dan peningkatan martabat kelompok jurnalis semaksimal

mungkin. Sejak memulai kariernya sebagai jurnalis, ia telah menetapkan praktik harian yang konsisten untuk membuat editorial surat kabar secara efisien dalam jangka waktu sekitar 1-2 jam. Kadang-kadang, ia membuat satu artikel, sementara di lain waktu, ia membuat dua artikel secara bersamaan. Ia telah menyelesaikan semuanya secara mandiri selama bertahun-tahun.

Sejak 23 November 1986 hingga 8 Oktober 1995, ia secara konsisten berkontribusi pada rubrik Asal Usul di surat kabar Kompas setiap minggunya. Rubrik ini menuntut ketelitian yang tinggi. Tulisan-tulisan dalam kategori ini, dibahas secara singkat dan disajikan dengan cara yang ringan, dengan penekanan pada aspek komedi. Mahbub berhasil mengatasi kendala penulisan yang cukup menantang ini. Selama 9 tahun masa aktifnya menulis di kolom ini, ia telah menghasilkan sebanyak 236 tulisan. Bagaimana Mahbub dapat memenuhi permintaan menulis yang relatif menantang ini? Jawabannya terletak pada tiga atribut penting yang mengitarinya - sebagai politisi, jurnalis, dan pelawak. Ini menempanya menjadi sosok yang multitalenta (<https://nu.or.id/tokoh/mengenal-mahbub-djunaidi-sang-pendekar-pena-ayDz4>, diakses pada 9 Januari 2023).

Tulisan satir telah lama menjadi senjata yang kuat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dengan menggabungkan humor, sindiran, dan kecerdasan, tulisan satir mampu menyoroti kekurangan atau kebijakan yang kontroversial tanpa harus terlalu serius atau mengancam. Tulisan ini seringkali disajikan dalam bentuk karangan, puisi, kartun editorial, atau bahkan dalam bentuk program komedi. Di balik kesenangan yang ditawarkan, tulisan satir

memiliki kekuatan untuk memicu pemikiran kritis di antara masyarakat, membuka mata terhadap masalah yang tersembunyi, dan mengundang refleksi.

Satir memanfaatkan parodi dan kekonyolan untuk mengekspos absurditas dalam kebijakan atau tindakan pemerintah. Dengan mengeksplorasi kontradiksi atau ketidaksesuaian, tulisan satir memperlihatkan sisi gelap dari keputusan atau perilaku pemerintah tanpa harus menggunakan retorika agresif. Hal ini memungkinkan pesan kritik yang dihadirkan lebih dapat diterima oleh khalayak yang mungkin terhindar dari kritik yang terlalu tajam.

Namun, kekuatan tulisan satir juga dapat menjadi bumerang. Tergantung pada konteks dan penerima pesan, tulisan satir bisa disalahartikan atau malah dianggap sebagai bahan hiburan semata. Terkadang, orang mungkin fokus pada unsur humor daripada substansi kritik yang ingin disampaikan, sehingga mengaburkan tujuan dari pesan kritik itu sendiri. Terlebih lagi, pemerintah atau pihak yang dikritik dapat merespon dengan mengekang kebebasan berekspresi, menyebabkan dampak yang bertentangan dengan tujuan tulisan satir.

Bagi penulis tulisan satir, penting untuk memahami tanggung jawab yang melekat. Meskipun bertujuan menghibur, menyampaikan pesan yang berani, dan memancing tawa, mereka harus tetap mempertimbangkan keakuratan fakta dan tidak menyebarkan informasi palsu. Dalam menghadapi respon, baik dari pihak yang disindir atau masyarakat, kritik yang bersifat konstruktif dapat membantu

penulis untuk terus berkembang dan menyampaikan pesan dengan lebih efektif.

Pada intinya, tulisan satir merupakan senjata yang ampuh dalam mengkritik pemerintah. Dengan kecerdasan yang menyelinap di balik kekocakan, tulisan ini mampu membangkitkan kesadaran publik, membuka percakapan, dan mendorong perubahan. Namun, perlu diingat bahwa tulisan satir bukanlah tanpa risiko, dan penggunaannya harus dilakukan dengan bijaksana agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh khalayak (Park-Ozee, 2019).

Pada masa Orde Baru, dimana kontrol terhadap kebebasan berekspresi sangat ketat, tulisan satir menjadi sebuah alat yang penting namun juga harus dilakukan dengan hati-hati. Gaya penulisan dalam bentuk satir pada periode ini membutuhkan pendekatan yang lebih tersamar dan halus agar tidak langsung menyinggung atau mencolok bagi objek kritik, terutama pemerintah. Kehadiran sensor dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat membuat penulis harus pintar menyusupkan sindiran dan kritik dalam bahasa yang tidak terlalu jelas, namun tetap mempertahankan esensi pesan yang ingin disampaikan (Liddle, 1985).

Penulisan satir pada masa Orde Baru membutuhkan kecerdasan dalam mengemas sindiran agar tidak langsung dapat ditangkap oleh objek kritik, yaitu pemerintah. Dengan menggunakan metafora, analogi, atau bahasa yang ambigu, tulisan satir dapat menyampaikan pesan kritis tanpa terlalu menarik perhatian secara langsung. Hal ini memungkinkan pesan untuk tetap tersampaikan kepada masyarakat

atau pembaca tanpa menimbulkan reaksi negatif atau ancaman terhadap penulisnya.

Pentingnya gaya tulisan yang lebih tersirat dan halus dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah pada masa Orde Baru juga menuntut penulis untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata dan konteks penyampaian. Dengan menghindari penyampaian yang terlalu jelas, tulisan satir pada masa itu menjadi sebuah senjata yang tersembunyi namun tetap tajam. Ini adalah upaya untuk menjaga diri dan pesan kritik agar tidak langsung menjadi target sensor atau represi dari pihak berwenang.

Dalam tulisannya yang berjudul "inlander" yang terbit dalam Tempo edisi 10 Agustus 1985, Mahbub menyindir banyak birokrat di masa Pemerintahan Soeharto yang bergaya seperti bos namun bermental inlander. Inlander adalah suatu istilah yang berasal dari masa Hindia Belanda untuk menyebut kelas masyarakat pribumi Hindia Belanda, seperti orang Jawa, Sunda atau Batak. Pejabat inlander ini disinggung seperti serigala di hadapan rakyatnya, namun seperti marmut saat berhadapan dengan orang asing.

Mahbub tidak menampik adanya anggapan bahwa bangsa Indonesia dikenal oleh publik mancanegara sebagai bangsa yang ramah dan selalu tersenyum. Ini merupakan kebalikan dari Orang Eropa yang cenderung tidak mudah tersenyum ke orang asing, atau selalu berbuat sopan kepada orang yang baru dikenalnya. Ia melihat sikap ramah yang dimiliki orang Indonesia, dalam beberapa sudut pandang, merupakan penjelmaan dari rasa takut dan hormat yang berlebihan dari orang pribumi kepada Bangsa Asing. Pada akhirnya ini membentuk sikap inferior orang Indonesia yang

selalu menganggap dirinya sebagai manusia yang berada di bawah tingkat orang Eropa, sehingga dengan berbuat ramah dan sopan, seakan-akan menutupi kekurangannya.

Lewat tulisan berjudul "inlander" ini, Mahbub juga menyindir kegemaran para pejabat Indonesia yang selalu membuka peluang yang besar bagi investor asing untuk menekuni pengembangan sektor publik di Indonesia, ketimbang bekerja sama dengan para pengusaha Indonesia sendiri. Mahbub menyindir pengusaha Indonesia pada tahun 1980-an seperti "pedangang pinggir jalan atau pedagang musiman" yang tidak tahu cara berbisnis modern. Ini sesungguhnya adalah bentuk satir dari keengganan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor mikro di negerinya sendiri dengan tidak memberikan peluang bagi warga lokal untuk dapat berbuat lebih untuk pembangunan nasional (Tempo, 10 Agustus 1985).

Mahbub kerap menyinggung manajemen pemerintahan di era Orde Baru dengan sebutan pemerintahan panitia. Ia melihat bahwa pemerintah sering sekali membentuk panitia, namun dengan tidak mempertimbangkan ukuran atau capaian kinerjanya. Ia tidak menyinggung kebiasaan di satu atau dua lembaga negara tertentu, melainkan dalam generalisasi. Ia menyindir bahkan jika Hari Kiamat akan datang, maka negeri ini bukannya sibuk untuk menyiapkan diri menghadapinya atau bagaimana cara selamat dari bencana besar itu, melainkan lebih sibuk dalam membentuk panitia untuk menghadapi kiamat.

Kehidupan Mahbub memang dekat dengan kehidupan komunal warga Jakarta. Ia mengalami kehidupan bukan hanya di kantor,

namun juga di pertemuan keluarga Betawi, suku bangsanya sendiri, sampai dengan pertemuan dengan para kiai. Sudah menjadi tradisi di Indonesia, bahwa saat orang-orang yang saling tidak mengenal bertemu dalam satu kesempatan, maka yang terbentuk adalah gaya resmi, di mana orang saling menjaga sikap agar terlihat perfeksionis. Jika Mahbub ada di tengah suasana tersebut, maka ia akan memecahkan suasana serba resmi itu dengan ejekan atau gurauan, sehingga membuat suasana yang serba beku dan kaku menjadi lebih cair (Kompas, 8 November 1979).

Dalam suatu tulisan lainnya, Mahbub melontarkan kritik kepada bisnis gelap pinjaman uang di bank dengan menjadikan aset negara sebagai jaminannya. Misalnya saja yang dilakukan seorang pengusaha terkenal bernama Idji Hartardji yang memperoleh pinjaman dana sebesar 2 miliar rupiah dari suatu bank pemerintah. Uniknya, keberhasilan mendapatkan pinjaman ini bertumpu pada keputusannya menjadikan suatu hotel pemerintah daerah, bernama Preanger, sebagai jaminan. Tentu saja keberhasilan ini bukan tanpa sebab. Muncul dugaan Idji telah berkongsi dengan para pejabat pemerintah untuk meloloskan permintaannya itu.

Di tulisan yang sama, Mahbub menyindir sulitnya pengusaha kecil memperoleh pinjaman di bank-bank pemerintahan. Untuk pinjaman sekitar 5 – 10 juta rupiah saja, para pengusaha harus antre dalam jangka waktu yang lama. Dengan kalimat sindiran, Mahbub menyebut kesabaran menunggu para penguasa itu mirip dengan yang dilakukan para biksu Budhha yang mempunyai mental kuat dalam menunggu waktu

kematiannya menuju kesempurnaan. Ini kalimat khas Mahbub, menyindir dengan suatu perumpamaan yang tidak terduga (Pelita, 15 Februari 1989).

Seorang penulis memiliki peran penting dalam mempengaruhi pemikiran dan pandangan masyarakat melalui tulisannya. Mahbub Djunaidi telah menunjukkan pendekatan yang unik dengan memilih bahasa yang mudah dimengerti oleh khalayak luas tanpa kehilangan aspek kritisnya. Keputusannya untuk mengekspresikan kritik terhadap pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, dalam tulisannya menunjukkan keberanian dan komitmen dalam menyampaikan pandangannya secara terbuka. Dengan demikian, kekhasan Mahbub Djunaidi sebagai penulis tercermin dalam kemampuannya untuk menghadirkan tulisan yang tidak hanya dapat dicerna oleh banyak orang, tetapi juga mampu membangkitkan refleksi dan perbincangan yang mendalam terkait isu-isu yang dibahas.

Selain itu, pendekatan Mahbub Djunaidi untuk menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap kritis juga dapat dianggap sebagai strategi efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas. Dengan menyajikan ide-ide kompleks dalam bahasa yang mudah dimengerti, ia mampu menjangkau pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Hal ini memungkinkan pesan-pesannya untuk lebih mudah tersebar dan dipahami oleh khalayak yang lebih luas, sehingga meningkatkan pengaruh dan relevansinya dalam ranah publik.

Kekhasan Mahbub Djunaidi sebagai penulis juga terletak pada keberaniannya untuk tetap

mempertahankan kritiknya terhadap pemerintah, meskipun menggunakan bahasa yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa keaslian dan ketegasannya dalam menyampaikan pandangan tidak tergantung pada kompleksitas bahasa, tetapi lebih pada substansi dan kejujuran dalam menyampaikan pesan. Dengan demikian, kekhasan Mahbub Djunaidi sebagai penulis tidak hanya terletak pada gaya bahasanya, tetapi juga pada keberanian dan konsistensinya dalam menyuarakan pandangannya terhadap kebijakan pemerintah.

## KESIMPULAN

Mahbub Djunaidi dikenal seorang aktivis sosial, wartawan, dan sastrawan yang secara berani menentang kebijakan pemerintah Indonesia pada era 1970 hingga 1990. Di tengah perubahan politik dan sosial yang melanda Indonesia, terutama di bawah rezim Soeharto, umat Islam menghadapi tantangan baru dalam mengekspresikan pemikiran dan aktivitas politiknya. Melalui pendekatan sejarah intelektual, tulisan ini berusaha menggali lebih dalam tentang relevansi dan dampak dari kritik Mahbub terhadap pemerintahan Soeharto, sementara gaya penulisannya yang khas dengan humornya yang tajam menjadikannya sebagai salah satu kolumnis terkemuka di Indonesia pada masa itu.

Melalui kritiknya yang tajam, Mahbub berhasil membawa isu-isu kebebasan berpolitik dan ekspresi intelektual, terutama di kalangan umat Islam. Langgam penulisan Mahbub yang memadukan humor dan satir memberikan dimensi tambahan dalam memperkuat pesannya, sehingga memungkinkan tulisannya untuk memiliki dampak yang signifikan dalam

menyuarakan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, tulisan ini menggambarkan peran Mahbub Djunaidi sebagai figur penting dalam sejarah intelektual Indonesia, serta menekankan pentingnya keberanian dan ketajaman kritik dalam menghadapi tantangan politik dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clapham, Christopher dkk. *The Political Dilemmas of Military Regimes*, London: Routledge, 2021.
- Duskaeva, Liliya. "Humour as An Information-Influencing Resource in Mass Media", dalam *The European Journal of Humour Research*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- <https://nu.or.id/tokoh/mengenai-mahbub-djunaidi-sang-pendekar-pena-ayDz4>, diakses pada 9 Januari 2023.
- Jenkins, David. *Young Soeharto: The Making of a Soldier, 1921-1945*, Singapura: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2021.
- Kadir, Suzaina. "The Islamic Factor in Indonesia's Political Transition", dalam *Asian Journal of Political Science*, Vol. 7, No. 2, 1999.
- Kompas, 8 November 1979.
- LaCapra, Dominick. "Rethinking Intellectual History and Reading Texts", dalam *History and Theory*, Vol. 19, No. 3, 1980.
- Liddle, R. William. "Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions", dalam *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 1, 1985.
- Lindsey, Tim. "Retreat from Democracy?: The Rise of Islam and the challenge for Indonesia", dalam *Australian Foreign Affairs*, Vol. 3, 2018.
- Madjid, M. Dien dkk. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Morfit, Michael. "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to The New Order Government", dalam *Asian Survey*, Vol. 21, No. 8, 1981.
- Park-Ozee, Dakota. "Satire: An Explication", dalam *Humor*, Vol. 32, No. 4, 2019.
- Pelita, 15 Februari 1989.
- Rosidi, Imron. "From Political Parties to Cultural Organizations: Indonesian Islamic Movements during The New Order", dalam *Journal of Al-Tamaddun*, Vol. 17, No. 1, 2022.
- Tempo, 10 Agustus 1985.